

Pembedayaan Kelompok Tani Melalui Pembangunan Irigasi: Lokasi Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala

Nisapafatia ^{1,*}; Sasterio ^{2,*}; Reyva Alviona Fernanda Priskilla^{3,*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; cipaippa@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; sasteriomansyur190961@gmail.com

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alvionareyva@gmail.com

*Correspondence : cipaippa@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Strategi,
Pemberdayaan, Kelompok Tani
Padi, Pemerintah Desa

Received. : Agustus 2026
Revised. : Agustus 2026
Accepted : Agustus 2026

ABSTRAK :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tantangan dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan air irigasi, ketergantungan pada bantuan eksternal, serta distribusi bantuan yang belum merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles, 2014). Teori yang digunakan adalah dari (Chandler, 1962). yang mencakup tiga dimensi: penetapan tujuan jangka panjang, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi tujuan jangka panjang, pemerintah desa telah menetapkan arah yang jelas melalui peningkatan hasil panen dan perbaikan irigasi, namun implementasi di lapangan masih terkendala anggaran dan faktor cuaca. Pada dimensi pemilihan tindakan, program seperti penyuluhan, bantuan alat pertanian, dan pupuk bersubsidi telah berjalan, namun belum merata dan masih terhambat oleh sistem distribusi yang kurang transparan. Dimensi pengalokasian sumber daya menunjukkan adanya partisipasi gotong royong yang baik, tetapi keterbatasan dana desa dan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat/daerah menjadi kendala utama. Rekomendasi utama meliputi: (1) peningkatan alokasi anggaran desa untuk sektor pertanian secara lebih proporsional; (2) penguatan sistem distribusi bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran; serta (3) peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan berkelanjutan agar tercipta kemandirian dan keberlanjutan usaha tani.

ABSTRACT

This study addresses the challenges involved in empowering rice farmer groups in Ogoamas I Village, where the majority of residents rely on the agricultural sector yet face obstacles such as limited irrigation water, reliance on external aid, and inequitable aid distribution. A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation techniques. Data analysis followed the interactive model developed by (Miles, 2014). Research informants included the Village. The study applies (Chandler, 1962) theory, which encompasses three dimensions: setting long-term goals, selecting courses

*of action, and allocating resources. Findings indicate that regarding long-term goals, the village government has established a clear direction focused on increasing crop yields and improving irrigation; however, field implementation remains hindered by budgetary constraints and weather conditions. Regarding the selection of actions, programs such as extension services, the provision of agricultural equipment, and subsidized fertilizers have been implemented but lack equity and are impeded by a lack of transparency in distribution systems. The resource allocation dimension reveals strong community participation through *gotong royong* (mutual cooperation), yet limited village funds and a reliance on central or regional government aid remain primary obstacles. Key recommendations include: (1) increasing the village budget allocation for the agricultural sector in a more proportional manner; (2) strengthening aid distribution systems to ensure greater transparency and accurate targeting; and (3) enhancing farmer capacity through continuous training to foster self-reliance and the sustainability of farming operations.*

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan indikator fundamental dalam mengukur efektivitas kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam penyelenggaraan program pemberdayaan ekonomi yang menjadi hak dasar setiap warga negara (Grathiano, 2023). Strategi pemberdayaan kelompok tani padi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, menjadi instrumen krusial dalam memberikan kepastian ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, mengingat sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan daerah dan identitas sosial budaya masyarakat setempat (Sisrilnardi, 2026). Dalam konteks pemerintahan desa, strategi pemberdayaan yang diterapkan harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan petani secara cepat, tepat, transparan, serta berkeadilan (Pradana, 2026), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminatif (Sasmito, 2019).

Strategi pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I, yang memiliki kondisi geografis dengan luas wilayah 33,58 Km² dan terdiri dari 6 dusun dengan mayoritas penduduknya (95%) berasal dari suku Bugis yang memiliki budaya bertani dan melaut yang kuat, merupakan aspek yang sangat penting untuk dikaji (Anam, 2022). Hal ini didasari pada pemahaman bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam mengakomodasi keterbatasan akses sumber daya alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat petani, seperti halnya di Desa Ogoamas I yang memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 580 Ha dan mayoritas penduduknya (867 orang) bekerja sebagai petani. Tanpa kualitas strategi pemberdayaan yang baik, potensi terjadinya kesenjangan antara kebijakan perencanaan dengan implementasi di lapangan, rendahnya partisipasi petani dalam program, atau bahkan praktik distribusi bantuan yang tidak merata dapat terjadi, yang pada akhirnya akan memperburuk kepercayaan petani terhadap institusi pemerintah desa dan menghambat akses mereka terhadap

program-program pemberdayaan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan (Monemnasi, 2022).

Pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I memiliki tiga dimensi penting yang harus diperhatikan dalam mengukur kualitas strategi pemberdayaan, yaitu penetapan tujuan jangka panjang (*long-term goals*), pemilihan tindakan (*courses of action*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*), mengingat ketiga dimensi ini merupakan indikator kunci dalam menilai strategi organisasi menurut (Chandler, 1962). Pelaksanaan ketiga dimensi ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti penetapan tujuan peningkatan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian, pelaksanaan program pemberian bantuan alat pertanian (tangki semprot, kasur, mesin rumput, parang) dan pupuk bersubsidi berbasis RDKK, pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui forum *Tudang Sipulung* bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL), perbaikan infrastruktur irigasi secara gotong royong, serta pemanfaatan dana desa (Rp1.470.462.369 dengan Dana Desa 62,22%) dan partisipasi masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemberdayaan bagi petani dalam mengembangkan usaha tani mereka (Alamsyah, 2025).

Pelaksanaan strategi pemberdayaan ini sering menghadapi tantangan kompleks, baik dari faktor internal institusi seperti keterbatasan anggaran desa dan ketersediaan air irigasi akibat cuaca ekstrem, maupun dari faktor eksternal seperti kurangnya pengetahuan petani terhadap teknik budidaya modern dan distribusi bantuan yang belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat petani di wilayah seperti Labuan Atas yang kesulitan mendapatkan aliran air karena bendungan rusak, serta ketimpangan penerimaan bantuan karena hanya petani tertentu yang terdaftar dalam RDKK yang berhak menerima pupuk subsidi, sehingga diperlukan peran aktif kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan pendekatan yang lebih adaptif, seperti mengoptimalkan perbaikan irigasi yang sedang berlangsung, mengintensifkan kegiatan *Tudang Sipulung*, memperkuat pengawasan distribusi bantuan melalui koordinasi dengan PPL, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian guna memastikan strategi pemberdayaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian kelompok tani dapat tercapai (Mahfuzat, 2025).

Strategi pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I diukur melalui pendekatan tiga dimensi yang saling berkaitan menurut (Chandler, 1962), yaitu: 1) Penetapan Tujuan Jangka Panjang, yang mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi petani melalui peningkatan hasil panen, penguatan kelembagaan kelompok tani agar lebih mandiri, serta perbaikan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan; 2) Pemilihan Tindakan (*Courses of Action*) yang meliputi pemberian bantuan sarana pertanian (alat pertanian, pupuk subsidi berbasis RDKK, dan peralatan mesin pertanian seperti combine dan traktor), pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis melalui kegiatan *Tudang Sipulung* dengan melibatkan PPL dan tokoh lokal (*pongawa galung/ulu-ulu*), perbaikan dan pembangunan irigasi yang melibatkan gotong royong petani, serta koordinasi dengan dinas pertanian dan pihak terkait; dan

3) Alokasi Sumber Daya, yang mencakup pemanfaatan dana desa (Rp1.470.462.369) untuk pembangunan irigasi dan pengadaan alat pertanian, pemanfaatan sumber daya manusia aparatur desa, PPL, dan petani dalam pelaksanaan program secara partisipatif, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, pusat, dan lembaga eksternal untuk memperkuat kapasitas petani (Asrifai, 2026)

Dengan menerapkan ketiga dimensi strategi ini, Pemerintah Desa Ogoamas I bersama jajaran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan kelompok gabungan tani (Gapoktan) dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam proses pemberdayaan, seperti masih adanya keterbatasan anggaran desa dalam memenuhi seluruh kebutuhan petani, ketergantungan pada bantuan eksternal dari pemerintah kabupaten/provinsi, belum optimalnya pendampingan teknis bagi petani, serta distribusi bantuan yang belum merata, sehingga dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk memastikan pemberdayaan petani yang transparan, akuntabel, dan secara optimal mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani serta kemandirian kelompok tani di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala.

Metode

Dasar penelitian yang diterapkan adalah Kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam mengenai strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani padi, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang diartikan sebagai metode penyelesaian masalah yang diteliti dengan menguraikan atau menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan (Assyakurrohim, 2022). Desain deskriptif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai keadaan serta situasi dari beragam data yang diperoleh, seperti hasil wawancara atau observasi terkait strategi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Teori yang dipakai untuk menganalisis adalah teori strategi menurut (Chandler 1962) dengan tiga unsur utama, yaitu: Penetapan Tujuan Jangka Panjang (*Long-term Goals*), Pemilihan Tindakan (*Courses of Action*), dan Pengalokasian Sumber Daya (*Resource Allocation*).

Menurut (Abdussamad, 2021), metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: kajian pustaka yang dilakukan sebelum penelitian dimulai dengan mencari referensi yang relevan mengenai strategi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, kelompok tani, serta penelitian sebelumnya yang sejenis, serta penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara: (1) Observasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara langsung memperhatikan objek yang diteliti, yaitu aktivitas strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I, termasuk proses musyawarah desa, kegiatan kelompok tani, dan pelaksanaan program pemberdayaan. (2) Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan enam informan yang dipilih secara sengaja, yang dianggap memahami masalah atau objek yang akan diteliti

(Rusandi, 2021), di antaranya: Ilham Muhammadih, S.PD selaku Kepala Desa Ogoamas I, Umar Genda selaku Sekretaris Desa, Sapril S.P selaku Koordinator Penyuluh Pertanian (BPP), Abd. Aziz selaku Ketua Kelompok Tani/Gapoktan, Hafid Syamsuddin selaku Anggota Kelompok Tani, dan Ridwan selaku Distributor Pupuk. Menurut (Waruwu, 2025), (3) Dokumentasi dimanfaatkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai objek dari sudut pandang dokumentasi, seperti profil Desa Ogoamas I, dokumen perencanaan desa (RKPDDes, APBDes), data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), data kelompok tani, serta foto-foto kegiatan pemberdayaan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam, dan perangkat dokumentasi untuk mengabadikan berbagai informasi yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Model analisis data yang diterapkan mengikuti metode interaktif yang dicetuskan oleh (Miles, 2014), yang memiliki tiga komponen utama: pertama, kondensasi data (*data condensation*), di mana data yang diperoleh dari wawancara dipilih, dipusatkan, dan disederhanakan untuk mempertajam fokus penelitian pada ketiga unsur teori strategi Chandler; kedua, penyajian data (*data display*), di mana peneliti menampilkan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan dengan pengelompokan yang sistematis berdasarkan ketiga indikator teori; dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dari seluruh data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi.

Hasil

Strategi Ditinjau Dari Penetapan Tujuan Jangka Panjang

Dalam konteks pembangunan strategi pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas, idealnya dimensi penetapan tujuan jangka panjang mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan produktivitas pertanian, hingga terciptanya kemandirian kelompok tani dalam mengelola usaha taninya. Pemerintah desa berperan sebagai perencana strategis yang memastikan setiap program pemberdayaan berjalan sesuai dengan arah pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDES dan RKPDES, mulai dari identifikasi kebutuhan petani, perumusan program, hingga penetapan target capaian yang terukur. Sementara itu, kelompok tani sebagai objek pemberdayaan berharap mendapatkan kepastian program yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan ekonomi mereka dapat meningkat secara signifikan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dimensi penetapan tujuan jangka panjang dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistemik. Keterlibatan pemerintah desa terlihat dalam menetapkan arah strategis yang jelas, seperti perbaikan sistem irigasi sebagai prioritas utama, peningkatan hasil produksi padi, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Namun implementasinya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Praktik prioritas yang diberikan pada pembangunan bendungan sebagai solusi utama mengatasi kekurangan air menunjukkan orientasi jangka panjang yang baik, namun masih

menghadapi kendala anggaran dan ketergantungan pada bantuan eksternal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan tujuan jangka panjang di Desa Ogoamas belum berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai bentuk hambatan. Pertama, keterbatasan anggaran desa yang hanya mampu mengalokasikan dana sekitar 12 juta rupiah untuk pembangunan irigasi, sehingga program pemberdayaan tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan petani secara menyeluruh. Kedua, ketergantungan pada bantuan dari pemerintah daerah dan pusat menyebabkan program tidak selalu berjalan sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan. Ketiga, masih adanya perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan petani mengenai skala prioritas program, di mana pemerintah desa lebih fokus pada infrastruktur fisik sementara petani juga membutuhkan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Meskipun tujuan jangka panjang telah ditetapkan, namun dari sudut pandang teori strategi alfred d. Chandler jr., penetapan tujuan yang ideal menuntut keselarasan antara perumusan tujuan, pemilihan tindakan, dan pengalokasian sumber daya secara terintegrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya integrasi ketiga elemen ini menyebabkan program pemberdayaan tidak sepenuhnya mencapai dampak yang diharapkan. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana secara nyata menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi penetapan tujuan jangka panjang di Desa Ogoamas I masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal perencanaan anggaran yang lebih memadai, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

Strategi ditinjau dari pemilihan tindakan

Penerapan dimensi pemilihan tindakan dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I menunjukkan adanya upaya prosedural yang baik, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan operasional yang signifikan. Peran pemerintah desa sejauh ini tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana program, tetapi juga fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak petani, seperti kebijakan memprioritaskan perbaikan irigasi sebagai tindakan utama mengatasi kekurangan air, serta pemberian bantuan alat pertanian, pupuk bersubsidi, dan bimbingan teknis melalui kegiatan *tudang sipulung*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara strategis, pemerintah desa telah menunjukkan responsivitas dengan memilih tindakan yang sesuai dengan permasalahan utama petani, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan pemerataan pelaksanaan program di tingkat operasional.

Kepala Desa Ogoamas I menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan administratif dan responsivitas terhadap kebutuhan petani dalam menerapkan dimensi pemilihan tindakan. Pemerintah desa sebagai pelaksana strategi wajib memilih program yang tepat sasaran, dan hal ini diwujudkan melalui pemberian bantuan yang diprioritaskan kepada petani yang berkekurangan serta pembangunan irigasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kerangka

strategi menurut alfred d. Chandler jr., pemilihan tindakan yang efektif tidak hanya mencakup jenis program yang dijalankan, tetapi juga ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Hal ini tercermin dari pernyataan kepala desa yang menekankan bahwa perbaikan irigasi menjadi prioritas karena ketersediaan air sangat menentukan keberhasilan usaha tani padi, serta kebijakan gotong royong yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemilihan tindakan yang diklaim oleh pemerintah desa belum sepenuhnya dirasakan oleh petani secara merata. Anggota kelompok tani mengeluhkan belum meratanya distribusi bantuan, keterbatasan kuota pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani, serta penggunaan alat mesin pertanian seperti *combine harvester* dan traktor yang pengelolaannya masih terbatas dan belum dapat diakses oleh seluruh petani. Petugas hanya mengatakan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan data rdkk, namun masih terdapat perbedaan antara kebutuhan petani dengan jumlah bantuan yang diterima. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kelemahan dalam sistem distribusi dan pengawasan, serta kesiapan infrastruktur teknis di unit pelayanan. Selain itu, pernyataan kepala desa yang menekankan bahwa bantuan alat-alat pertanian difokuskan pada petani yang berkekurangan justru mengindikasikan adanya potensi ketimpangan dalam penerimaan bantuan yang dapat menimbulkan persepsi kurang adil di kalangan petani.

Temuan observasi memperlihatkan bahwa gap antara harapan dan realitas ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ogoamas I masih terjebak dalam paradoks strategi prosedural, di mana perencanaan program sering kali belum diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten dan merata. Petani yang datang dari dusun-dusun terpencil dengan luas lahan yang bervariasi merasakan beban ekstra ketika harus menghadapi distribusi bantuan yang tidak merata dan sistem irigasi yang belum optimal. Kegagalan pada sistem distribusi pupuk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rdkk, keterlambatan perbaikan irigasi yang mempengaruhi musim tanam, serta kurangnya pendampingan teknis yang berkelanjutan merupakan bukti bahwa dimensi pemilihan tindakan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan tindakan bukan hanya tentang ada tidaknya program yang dijalankan, tetapi tentang ketepatan sasaran, pemerataan, dan keberlanjutan yang menjadi esensi strategi pemberdayaan yang berkualitas.

Strategi Ditinjau Dari Pengalokasian Sumber Daya

Partisipasi masyarakat pada dimensi pengalokasian sumber daya dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I telah berkembang melampaui sekadar pemenuhan prosedur administratif. Peran masyarakat dalam tahap ini, menurut teori alfred d. Chandler jr., mencakup pemanfaatan dan pendistribusian sumber daya secara tepat agar setiap tindakan dapat berjalan efektif dan efisien. Temuan menunjukkan bahwa secara prosedural, pemerintah desa telah merancang elemen pengalokasian sumber daya dengan kuat, seperti pemanfaatan anggaran desa untuk pembelian material pembangunan irigasi, kolaborasi dengan balai penyuluhan

pertanian (BPP) dan penyuluh pertanian lapangan, serta pelibatan petani melalui sistem gotong royong. Namun, di sisi lain, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga merasakan adanya keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian akibat praktik-praktik pengelolaan yang belum optimal.

Kepala Desa Ogoamas 1 menegaskan pentingnya optimalisasi dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Pemerintah desa secara konsisten memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan utama petani, seperti pembangunan irigasi, serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat melalui gotong royong. Namun, dalam kerangka pengalokasian sumber daya yang ideal, pernyataan bahwa "anggaran desa terbatas dan hanya mampu membeli semen" harus dibaca sebagai fenomena keterbatasan fiskal yang menghambat cakupan program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan secara menyeluruh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi serius pada dimensi pengalokasian sumber daya. Pertama, keterbatasan anggaran desa yang hanya sekitar 12 juta rupiah untuk pembangunan irigasi, sehingga tidak semua kebutuhan petani dapat terpenuhi. Kedua, ketergantungan pada bantuan dari pemerintah daerah dan pusat menyebabkan program tidak selalu berjalan sesuai dengan kebutuhan riil petani. Ketiga, adanya indikasi perbedaan akses terhadap sumber daya, di mana petani yang terdaftar dalam rdkk mendapatkan pupuk bersubsidi, namun masih terdapat keluhan mengenai kuota yang tidak mencukupi. Keempat, sistem pengelolaan alat mesin pertanian yang terbatas dan belum dapat diakses secara merata oleh seluruh petani.

Temuan observasi dan wawancara dengan masyarakat memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya yang dirasakan petani bukanlah sekadar persepsi individual, melainkan konstruksi sosial yang dihasilkan dari pengalaman kolektif dan pola interaksi berulang antara petani dan pemerintah desa. Ketidakpastian akan ketersediaan air akibat kerusakan bendungan, keterbatasan kuota pupuk bersubsidi, serta akses yang belum merata terhadap alat pertanian menciptakan tekanan bagi petani untuk tetap bertahan dalam usaha taninya. Hal ini menunjukkan adanya dominasi kendala struktural yang terbangun secara sistemik di lingkungan pemerintahan desa, di mana keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam mewujudkan strategi pemberdayaan yang komprehensif. Dengan demikian, meskipun aspek pengalokasian sumber daya secara prosedural telah dirancang, pelaksanaannya di tatanan operasional masih gagal menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya bagi seluruh petani, sehingga memerlukan reformasi pengelolaan anggaran, penguatan kemitraan dengan berbagai pihak, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta evaluasi berbasis bukti empiris untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik pemberdayaan.

Strategi Ditinjau Dari Faktor Pendukung Dan Penghambat Program

Dimensi faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas menunjukkan adanya upaya parsial yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya identifikasi kendala dan potensi, namun

masih dihadapkan pada berbagai hambatan sistemik yang memengaruhi keberhasilan program. Kepala Desa dan sekretaris Desa menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan seperti perbaikan irigasi, pemberian bantuan alat pertanian, dan penyuluhan melalui kegiatan *tudang sipulung*, sebagai bentuk respons terhadap permasalahan utama petani. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan ketua kelompok tani/Gapoktan berperan aktif dalam memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi petani, seperti peningkatan pengetahuan tentang teknik budidaya padi yang baik, penggunaan pupuk secara tepat, pengendalian hama, serta penentuan jadwal tanam yang terkoordinasi. Dalam kerangka strategi, pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya preventif dan kuratif berbasis ekosistem pertanian, yang bertujuan memperkuat kapasitas adaptasi petani terhadap dinamika perubahan iklim dan tantangan produksi. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun upaya ini telah dilakukan, masih terdapat faktor penghambat yang signifikan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa petani menyatakan perbaikan irigasi sangat dibutuhkan, terutama di Wilayah Labuan Atas yang mengalami kekurangan air akibat kerusakan bendungan. Keterbatasan ketersediaan air yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu dan sumber mata air yang mulai mengering menjadi kendala utama yang berdampak langsung pada produktivitas padi. Selain itu, keterbatasan anggaran desa yang hanya mampu membeli material seperti semen, sementara biaya tenaga kerja ditanggung melalui gotong royong, menunjukkan adanya kendala finansial yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan petani bersama-sama menghadapi tantangan sistemik dalam mewujudkan strategi pemberdayaan yang efektif.

Temuan observasi dan wawancara dengan masyarakat memperlihatkan bahwa meskipun terdapat faktor pendukung pada level prosedural dan sosial (kerja sama antar petani, dukungan dari BPP, gotong royong), pada level implementasi dan pengalaman riil petani, faktor penghambat masih mendominasi. Petani yang lahannya membutuhkan aliran air tidak merasakan kepastian ketersediaan air akibat proses pembangunan bendungan yang belum selesai dan masih terkendala cuaca. Selain itu, kesenjangan antara kebutuhan pupuk riil petani dengan kuota yang diterima melalui RDKK menyebabkan produksi tidak optimal. Hal ini membuktikan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, strategi pemberdayaan masih memerlukan perbaikan fundamental dalam hal peningkatan alokasi anggaran, penguatan sistem distribusi bantuan, percepatan pembangunan infrastruktur irigasi, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Strategi Ditinjau Dari Partisipasi Masyarakat Dan Gotong Royong

Dimensi partisipasi masyarakat dan gotong royong dalam strategi

pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas secara formal dan prosedural telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang bersifat sistemik dan kultural. Kepala desa dan aparat desa menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya melibatkan masyarakat secara maksimal dalam setiap program pemberdayaan, seperti pembangunan dan perbaikan irigasi yang dilakukan secara gotong royong, di mana petani yang lahannya terdampak langsung turut serta dalam proses pembangunan. Untuk menunjang kegiatan pertanian, pemerintah desa juga menyediakan bantuan alat-alat pertanian, pupuk bersubsidi melalui RDKK, serta menyelenggarakan kegiatan *tudang sipulung* sebagai forum koordinasi dan peningkatan kapasitas petani. Dalam kerangka partisipasi, upaya ini merefleksikan kesadaran institusional terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai elemen pembentuk keberhasilan program pemberdayaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat telah tersedia, implementasi di lapangan kerap kali tidak sinkron dengan harapan petani. Anggota kelompok tani secara eksplisit mengidentifikasi bahwa meskipun pembangunan irigasi melibatkan gotong royong, prosesnya masih berjalan lambat karena terkendala cuaca dan keterbatasan material. Petani yang tergabung dalam rdkk menerima pupuk bersubsidi, namun kuota yang diterima sering kali tidak mencukupi kebutuhan riil. Kegiatan *tudang sipulung* yang dilaksanakan sebagai sarana bimbingan dan informasi berjalan dengan baik, namun masih ada petani yang tidak dapat hadir karena keterbatasan akses dan waktu. Sistem musim tanam (mt1 dan mt2) yang telah disepakati bersama melalui koordinasi antara petani, tokoh lokal (*pongawa galung/ulu-ulu*), dan dinas pertanian membantu mengatur pola tanam, namun perubahan iklim seperti fenomena *el-nino* tetap menjadi ancaman yang tidak dapat dikendalikan.

Temuan penelitian juga mengungkapkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan petani mengenai tingkat partisipasi yang diharapkan. Indikasi bahwa petani yang tidak ikut serta dalam gotong royong akan kesulitan saat musim tanam menyiratkan adanya tekanan sosial yang mendorong partisipasi, meskipun di sisi lain petani menyadari pentingnya pembangunan bendungan bagi keberlangsungan usaha tani mereka. Eksistensi beban psikologis dalam bentuk kecemasan akan kekurangan air dan ketidakpastian musim tanam menunjukkan bahwa petani tidak hanya menghadapi hambatan fisik, tetapi juga mengalami tekanan moral dan ekonomi yang sistemik. Akibatnya, meskipun partisipasi masyarakat seperti gotong royong, kehadiran dalam kegiatan *tudang sipulung*, dan kepatuhan terhadap RDKK menunjukkan keterlibatan yang baik, efektivitas partisipasi dalam mendorong perubahan substantif masih terbatas.

Temuan observasi dan wawancara dengan masyarakat memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian antara indikator kuantitatif partisipasi dan dampak kualitatif yang dirasakan petani menegaskan bahwa evaluasi strategi pemberdayaan tidak boleh hanya berhenti pada aspek keterlibatan fisik, melainkan harus menggali secara kritis apakah partisipasi tersebut benar-benar memberdayakan petani atau justru menjadi beban tambahan. Dengan demikian, meskipun tahapan partisipasi secara administratif dapat dinyatakan terlaksana, keberhasilan tersebut tetap bersifat parsial

dan belum menyentuh esensi pemberdayaan yang sesungguhnya, yaitu terciptanya kemandirian, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha tani. Kesenjangan antara keterlibatan masyarakat dalam program dengan hasil yang dicapai, serta masih adanya kendala struktural seperti keterbatasan anggaran, ketergantungan pada bantuan eksternal, dan ketidakpastian iklim, tetap menjadi tantangan serius yang mencederai efektivitas strategi pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas I.

Pembahasan

Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani padi di Desa Ogoamas, jika ditelaah melalui tiga elemen utama teori Alfred D. Chandler Jr. (Penetapan Tujuan Jangka Panjang, Pemilihan Tindakan, dan Pengalokasian Sumber Daya), menunjukkan sebuah realitas yang kompleks dan penuh dengan upaya serta tantangan. Secara normatif, pemerintah desa telah merumuskan visi dan arah yang jelas untuk memberdayakan petani, yang merupakan mayoritas penduduknya. Namun, implementasi di lapangan masih diwarnai oleh berbagai kesenjangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketergantungan pada bantuan eksternal, hingga belum optimalnya pendampingan teknis. Temuan ini mengindikasikan adanya jurang pemisah antara 'cita-cita strategis' yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan realitas sosiologis dan operasional di tingkat tapak, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan itu sendiri.

1. Penetapan Tujuan Jangka Panjang

Dimensi penetapan tujuan jangka panjang merupakan fondasi dari strategi pemberdayaan. Dalam konteks Desa Ogoamas I, pemerintah desa telah menetapkan arah yang strategis dan terukur untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk sasaran konkret seperti peningkatan hasil panen padi, perbaikan infrastruktur pertanian (terutama irigasi), dan penguatan kelembagaan kelompok tani agar lebih mandiri. Secara konseptual, tujuan-tujuan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa dan merupakan respons langsung terhadap kondisi geografis serta demografis desa, di mana mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian.

Meskipun tujuan jangka panjang telah dirumuskan dengan baik, terdapat beberapa kelemahan fundamental dalam proses penetapan dan implementasinya. Pertama, tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan cenderung reaktif terhadap masalah mendesak, seperti bencana kekeringan, daripada bersifat proaktif (Sasterio, 2025). Misalnya, fokus utama pemerintah desa pada perbaikan bendungan dan irigasi merupakan respons langsung terhadap krisis air yang berulang, yang menunjukkan bahwa strategi jangka panjang sering kali dikorbankan untuk mengatasi masalah taktis di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan jangka panjang belum sepenuhnya diintegrasikan dengan perencanaan yang adaptif dan antisipatif terhadap perubahan iklim.

Kedua, tujuan yang ditetapkan belum sepenuhnya disosialisasikan dan menjadi kesepahaman kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat petani. Berdasarkan hasil wawancara, informasi mengenai arah kebijakan dan target yang ingin dicapai

sering kali hanya disampaikan dalam forum-forum formal seperti *tudang sipulung*, namun belum menjadi dokumen hidup yang dipahami secara mendalam oleh seluruh anggota kelompok tani. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dengan apa yang diharapkan dan dirasakan oleh petani. Akibatnya, tujuan jangka panjang belum sepenuhnya mampu menggerakkan partisipasi dan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan yang ditetapkan juga belum dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Meskipun ada target peningkatan produksi dan kesejahteraan, tidak ada mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan tersebut. Sebagai contoh, tidak ada data *baseline* yang jelas tentang produktivitas padi sebelum dan sesudah program, sehingga sulit untuk menilai efektivitas strategi secara objektif. Tanpa adanya ukuran yang jelas, strategi pemerintah desa menjadi tidak terarah dan sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan jangka panjang hanya berakhir sebagai pernyataan visi tanpa eksekusi yang terukur.

2. Pemilihan Tindakan (*Courses of Action*)

Dimensi pemilihan tindakan menjadi langkah konkret untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Pemerintah Desa Ogoamas I telah merumuskan serangkaian program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan utama petani, seperti penyediaan bantuan sarana pertanian (alat semprot, mesin rumput), penyaluran pupuk bersubsidi, pembangunan dan perbaikan irigasi, serta pemberian bimbingan dan penyuluhan melalui kegiatan *tudang sipulung*.

Secara normatif, pemilihan tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah desa untuk mengatasi masalah-masalah krusial di sektor pertanian. Namun, dalam implementasinya, terdapat inkonsistensi dan ketidakefektifan yang signifikan.

a. Prioritas Tindakan yang Tidak Berimbang

Meskipun berbagai program dijalankan, ada kecenderungan untuk memprioritaskan tindakan yang bersifat fisik (seperti pembangunan irigasi) dibandingkan dengan penguatan kapasitas dan kemandirian petani. Sebagaimana diakui oleh kepala desa dan sekretaris desa, bantuan alat pertanian dan pupuk diberikan, namun bantuan ini sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Selain itu, program pelatihan dan penyuluhan, meskipun ada, sering kali hanya bersifat seremonial dan belum terintegrasi dengan kebutuhan teknis petani yang spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan tindakan lebih berorientasi pada solusi jangka pendek yang mudah diukur (seperti melihat bendungan dibangun) daripada investasi jangka panjang pada peningkatan kapasitas manusia, yang hasilnya tidak terlihat secara instan.

b. Kegagalan dalam Menjamin Keadilan dan Aksesibilitas

Pemilihan tindakan juga gagal dalam hal keadilan dan aksesibilitas. Meskipun tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh petani, implementasi tindakan sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan. Sebagai

contoh, bantuan sarana pertanian dan pupuk bersubsidi cenderung lebih mudah diakses oleh petani yang memiliki koneksi atau posisi sosial tertentu. Fenomena "pilih kasih" dalam penyaluran bantuan, sebagaimana tercermin dalam wawancara dengan petani dan distributor pupuk, mengindikasikan adanya praktik diskresi yang tidak terkontrol. Kelompok tani yang aktif dan dekat dengan aparat desa atau PPL cenderung mendapatkan prioritas, sementara petani kecil dan marginal sering kali terpinggirkan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan dan pemerataan yang seharusnya menjadi dasar pemberdayaan.

c. Tidak Ada Mekanisme Evaluasi dan Pembelajaran

Kelemahan paling kritis dari pemilihan tindakan adalah ketiadaan mekanisme evaluasi yang terstruktur. Meskipun ada forum *tudang sipulung*, pertemuan tersebut lebih berfungsi sebagai sarana koordinasi dan sosialisasi daripada evaluasi program secara mendalam. Tidak ada indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program, sehingga tidak diketahui apakah bantuan yang diberikan benar-benar efektif meningkatkan produktivitas, atau apakah pelatihan yang diberikan mampu mengubah cara bertani. Akibatnya, program yang sama diulang setiap tahun tanpa adanya perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Kegagalan dalam membangun siklus pembelajaran (*learning cycle*) ini membuat strategi pemerintah desa menjadi stagnan dan tidak adaptif terhadap perubahan.

3. Pengalokasian Sumber Daya

Dimensi pengalokasian sumber daya merupakan faktor penentu utama efektivitas strategi (Sasterio, 2026). Dalam konteks Desa Ogoamas, sumber daya yang terbatas (anggaran desa yang kecil) merupakan tantangan terbesar. Namun, yang menjadi masalah kritis bukan hanya ketersediaan sumber daya, tetapi bagaimana sumber daya yang ada dikelola dan dialokasikan.

a. Ketergantungan pada Sumber Daya Eksternal

Pemerintah desa sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Sebagaimana diakui oleh kepala desa, bantuan seperti bibit padi dan *handtraktor* sering kali berasal dari program ketahanan pangan pemerintah pusat atau provinsi, bukan dari APBDes. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan, karena program pemberdayaan menjadi sangat bergantung pada kebijakan dan alokasi anggaran dari tingkat yang lebih tinggi. Jika bantuan eksternal tersebut tidak datang, atau terlambat, maka program pemberdayaan di desa akan terhambat. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan desa untuk mengembangkan kemandirian fiskal dan manajerial.

b. Alokasi yang Tidak Transparan dan Tidak Tepat Sasaran

Pengalokasian sumber daya, terutama dana desa, juga menghadapi masalah transparansi dan ketepatan sasaran. Meskipun ada alokasi anggaran untuk sektor pertanian, mekanisme penentuannya sering kali tidak melibatkan masyarakat petani secara partisipatif. Keputusan tentang program apa yang akan didanai dan berapa

besar anggarannya sering kali ditentukan oleh musyawarah yang formal, namun pada praktiknya diwarnai oleh dominasi elit desa.

Anggaran yang terbatas sering kali tidak dialokasikan untuk kegiatan yang paling dibutuhkan petani. Misalnya, meskipun petani sangat membutuhkan bantuan pupuk dan benih berkualitas, alokasi dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan fisik seperti irigasi, yang biayanya jauh lebih besar. Selain itu, tidak ada mekanisme pelaporan yang transparan sehingga masyarakat sulit mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran secara pasti. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa pengelolaan sumber daya belum sepenuhnya akuntabel dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

c. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Sosial yang Belum Maksimal

Meskipun sumber daya finansial terbatas, Desa Ogoamas memiliki modal sosial yang kuat berupa semangat gotong royong dan kearifan lokal (*tudang sipulung*). Namun, pemerintah desa belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi ini sebagai sumber daya strategis. Keterlibatan petani dalam pembangunan irigasi, misalnya, lebih dipahami sebagai bentuk "kerelaan" untuk membantu, bukan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan yang terencana untuk membangun kepemilikan dan tanggung jawab kolektif.

Peran penyuluh pertanian (PPL) yang terbatas dan tidak selalu hadir di lapangan menjadi kelemahan serius. Padahal, PPL adalah sumber daya teknis yang sangat penting untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan. Kegagalan pemerintah desa dalam memaksimalkan peran PPL dan membangun hubungan kerja yang sinergis dengan lembaga-lembaga teknis lainnya (seperti BPP dan Dinas Pertanian) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia masih belum terintegrasi secara efektif. Akibatnya, pemberdayaan tidak berjalan optimal dan petani sering kali kembali ke cara-cara tradisional tanpa adanya inovasi dan peningkatan pengetahuan yang signifikan.

Kesimpulan

Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Padi di Desa Ogoamas I secara keseluruhan telah mengikuti kerangka perencanaan yang sistematis, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program. Dari aspek penetapan tujuan jangka panjang, pemerintah desa telah menetapkan arah yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan hasil produksi padi, perbaikan sarana pertanian, serta mendorong kemandirian kelompok tani, yang diwujudkan melalui prioritas pembangunan dan perbaikan sistem irigasi sebagai infrastruktur vital, namun realisasinya masih terkendala karena belum adanya indikator kinerja yang terukur secara sistematis untuk mengevaluasi capaian pemberdayaan secara berkala.

Dari sisi pemilihan tindakan, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program seperti pemberian bantuan alat pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme RDKK, serta bimbingan dan pendampingan melalui kegiatan *tudang sipulung* yang melibatkan kerja sama dengan BPP dan penyuluh lapangan,

namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran desa (hanya sekitar Rp12 juta untuk pembangunan irigasi), ketergantungan pada bantuan eksternal untuk bibit unggul dan alat mesin pertanian, serta distribusi bantuan yang belum merata karena prioritas pada petani berkekurangan tanpa kriteria yang jelas dan transparan, di samping kegiatan penyuluhan yang belum berjalan kontinu sehingga transfer pengetahuan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas petani secara berkelanjutan. Dari sisi pengalokasian sumber daya, pemerintah desa telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien melalui anggaran desa, dukungan pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong dalam pembangunan irigasi yang menunjukkan pendekatan pemberdayaan partisipatif, namun efektivitasnya masih bertumpu pada keterbatasan kapasitas fiskal desa dan konsistensi dukungan eksternal, serta belum adanya sistem pengelolaan sumber daya yang terintegrasi seperti perencanaan kebutuhan jangka panjang berbasis data petani yang akurat, skema pembiayaan alternatif, dan mekanisme pemeliharaan infrastruktur pasca-pembangunan, sehingga program pemberdayaan rentan terhenti ketika bantuan eksternal tidak tersedia.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan, serta kepada semua informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti yang telah memberikan saran dan kerja sama yang berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah desa dan masyarakat mengenai Pemberdayaan kelompok tani melalui pembangunan irigasi ; Lokasi Desa Ogoamas 1, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam lingkup Ilmu Pemerintahan.

Referensi

- Anam, S., & Pitopang, A. M. (2022). Etnobotani Masyarakat Bugis Di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. *Journal.Untad.Ac.Id*.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Chandler Jr, A. D. (1962). *Strategy And Structure: Chapters In The History Of The American Industrial Enterprise*. MIT PRESS. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Xvz4wooyzmac&oi=fnd&pg=PA1&dq=Strategy+And+Structure+Chapters+In+The+History+Of+The+America+Industrial+Enterprise&ots=Djyavyryfx&sig=Evtfwlmaeggt0h-2d9l3qnuitnu&redir_esc=Y#V=Onepage&Q=Strategy+And+Structure+C
- Grathiano, L. (2023). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. In *Apmd. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*.

- Hafid, M., Pageno, I., & Sisrilnardi. (2026). Strategi Politik Dalam Kemenangan Hadiano Rasyid—Reny Lamadjido Di Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020. Perpustakaan Untad.
- Irwansyah Kamindang, Sasterio. (2026). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palu (Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu). Perpustakaan Untad.
- Lestari, W. A., Asrifai, & Pradana, A. (2026). Strategi Pemerintahan Desa Dalam Menaggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. Perpustakaan Untad, 02(01), 39–57.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis.
- Monemnasi, G. R., Pala, A., & Tiza, A. L. (2022). Trategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Sawah Di Desa Oekopa Kecamatan Biboki Tanpah Kabupaten Timor Tengah Utara. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 4(3), 243–250.
- Oktaviani, N. R., Alamsyah, ; M Nur, Rusmawaty, ;, & Rusdin, B. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 01(03), 14-26.
- Rusandi M. Muhammad Rusli. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan.
- Sasterio, Syamsul Bahri, Yusran. (2025). Kinerja Kelompok Tani Mekar Jaya Dalam Pendistribusian Bantuan Pupuk Bersubsidi Di Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Perpustakaan Untad.
- Septin, M. R., Asrifai, & Rusdin, R. (2026). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. Perpustakaan Untad, (02(01)), 97-115.
- Silvana Fisca, A. M., Alamsyah, M. N., & Mahfuzat. (2025). Roses Ganti Rugi Lahan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Agensi Di Desa Korowou. Perpustakaan Untad, 01(05).
- Sodi Liwu, A., & Sasmito, C. (2019). Trategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. Universitas Tadulako, (8(4)), 228–233.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta., 2013.
- Waruwu, M., Pu`At, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Zuchri Abdussamad,. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.